

MATRIKS GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah dengan mendorong peningkatan Kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	○ Program Hubungan Industrial ○ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ○ Program Penempatan Tenaga Kerja ○ Program Promosi Penanaman Modal ○ Program Perencanaan Tenaga Kerja ○ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ○ Program Pelayanan Penanaman Modal ○ Program Penunjang
			Meningkatkan kesempatan kerja	Persentase peningkatan serapan tenaga kerja	
			Meningkatnya kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	
			Meningkatkan Peluang Investasi	Jumlah investor terdaftar(PMDN/PMA)	
			Meningkatkan kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
					Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
- Data Terpilah Terkait Isu Gender : - o Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) - o Data Pekerjaan Masyarakat Padang Panjang Berdasarkan Jenis Pekerjaan - o Data Pencari Kerja Di Kota Padang Panjang - o Data Pencari Kerja yang telah mengikuti Pelatihan di Kota Padang Panjang - Identifikasi Isu Gender Strategis : - o Data dan proyeksi dalam RTKM (angkatan kerja, pengangguran terbuka, kebutuhan tenaga kerja per sektor) sering disusun tanpa disagregasi jenis kelamin yang	- Metodologi dan template penyusunan RTKM belum mewajibkan disagregasi data jenis kelamin di setiap indikator. - Metodologi pemetaan potensi investasi lebih berfokus pada sektor skala besar/menengah yang umumnya dikelola laki-laki (manufaktur, konstruksi, pertambangan), belum mengintegrasikan data usaha mikro milik perempuan. - Standar sarana dan prasarana pelatihan belum mengakomodasi kebutuhan pengguna perempuan (mis. ukuran APD, ruang ganti, toilet terpisah). - Petugas penyuluh belum seluruhnya dibekali pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG). - Kriteria penerima manfaat program perluasan kesempatan kerja belum memuat afirmasi bagi kelompok	- Mewajibkan seluruh indikator dalam RTKM (angkatan kerja, TPAK, pengangguran terbuka, proyeksi kebutuhan tenaga kerja per sektor) disajikan terpilah jenis kelamin - Mendorong mitra swasta/industri menyediakan instruktur perempuan, minimal sebagai instruktur pendamping, khususnya pada bidang teknis. - Mengintegrasikan data usaha mikro dan sektor unggulan berbasis perempuan (kerajinan, kuliner, industri rumahan) ke dalam peta potensi investasi. - Menetapkan kuota/afirmasi bagi perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan dalam program perluasan kesempatan kerja. - Merevisi modul bimbingan jabatan	Pd Relevan : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
memadai, sehingga kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak terlihat dan tidak menjadi dasar perumusan kebijakan. - o Peta potensi investasi belum memuat data dan analisis sektor usaha yang banyak digeluti perempuan (industri rumahan, kerajinan, kuliner skala kecil), sehingga potensi investasi berbasis usaha perempuan kurang terlihat dan jarang menjadi prioritas promosi. - o Materi bimbingan jabatan cenderung mengarahkan pencari kerja perempuan ke jenis pekerjaan tertentu (administrasi, tata boga, layanan) berdasarkan asumsi peran gender, bukan minat dan kompetensi individu. - o Program perluasan kesempatan kerja (padat karya, fasilitasi wirausaha, kemitraan usaha) belum menjangkau kelompok perempuan secara proporsional, terutama perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas perempuan. - o Sarana dan prasarana pelatihan	perempuan rentan (kepala keluarga, disabilitas). - Belum Adanya Kebijakan Terkait Tenaga Kerja Diatas 65 Tahun Karena Usia Tenaga Kerja Sudah Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Beberapa Sektor Pelatihan Hanya Berfokus Pada Laki-Laki - Adanya Kebijakan Yang Memprioritaskan Kepala Keluarga Karena Adanya Stigma Bahwa Hanya Kepala Keluarga Yang Mencari Nafkah - Tidak Semua Masyarakat Memiliki Akses Dan/Atau Kesadaran Untuk Mengupdate Data Mereka Seperti Data Pekerjaan, Domisili, Dan Data Terkait Lainnya. - Masih Adanya Masyarakat Yang Gaptek Dan Lambat Dalam Menerima Informasi Terkait Program Pemerintah - Pelaksanaan Job Fair Belum Secara Aktif Menargetkan Peningkatan Peserta Pencari Kerja Perempuan - Jenis Dan Kuota Pelatihan Blk/Vokasi Belum Disusun Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pasar Kerja Yang Mempertimbangkan Minat Dan	agar netral gender dan berbasis minat serta kompetensi individu. - Menambahkan Prioritas Penerima Program Kegiatan Pekerja Sektor Informal Bukan Hanya Untuk Kepala Keluarga - Membuka Akses Dan Mempromosikan Pelatihan Vokasi Bidang Teknis/Non-Tradisional Secara Aktif Kepada Peserta Perempuan. - Mendorong Perusahaan Mitra Menyediakan Skema Kerja Fleksibel (Paruh Waktu/Work From Anywhere) Yang Ramah Bagi Pencari Kerja Perempuan Dengan Peran Pengasuhan. - Menyusun Basis Data Investor Dan Pelaku Usaha Terpilah Jenis Kelamin Sebagai Dasar Pemantauan. - Menyediakan Klinik/Helpdesk Pendampingan Perizinan (Oss/Nib) Khusus Bagi Pelaku Usaha Perempuan Dan Ukm. - Tersedianya Layanan/Fasilitas Khusus Bagi Lansia, Toilet Ramah Lansia, Ruang Ibu Menyusui Dan Ruang Ramah Anak/Taman Bermain.	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
(alat kerja, bengkel, alat pelindung diri) belum didesain mengakomodasi kebutuhan pengguna perempuan. Masyarakat Harus Memenuhi Syarat Batas Usia Yaitu Rentang Usia Bekerja 15 – 65 Tahun - o Adanya Perwako Yang Mengatur Tentang Pedoman Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Dan Harus Terdaftar Dalam DTKS - o Pengambilan Keputusan Investasi/Usaha, Khususnya Pada Skala UMKM, Masih Didominasi Laki-Laki Sebagai Pemilik/Penangguna Jawab Usaha Yang Tercatat Secara Legal. - o Terdapat Prioritas Sasaran Yaitu Kepala Keluarga, Sehingga Sebagian Pekerja Informal Perempuan Tidak Sepenuhnya Masuk Dalam Data - o Pencari Kerja/Pekerja Perempuan Memiliki Akses Lebih Rendah Terhadap Pelatihan Vokasi Bidang Teknis/Non-Tradisional (Otomotif, Elektronik, Konstruksi, Tik) Dan Lebih Banyak Diarahkan Ke Bidang	Potensi Peserta Perempuan Di Bidang Non-Tradisional. - Data Investor Dan Pelaku Usaha Belum Konsisten Dipilih Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik/Penangguna Jawab Usaha. - Penerima Layanan Pada Mall Pelayanan Publik Seringkali Dilakukan Oleh Lansia Serta Ibu Menyusui Dan Anak-Anak		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Tata Boga, Tata Busana, Dan Kecantikan. o Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tercatat Jauh Lebih Rendah Dibanding Laki-Laki, Termasuk Partisipasi Dalam Bursa Kerja/Job Fair.			

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
- Mewajibkan seluruh indikator dalam RTKM (angkatan kerja, TPAK, pengangguran terbuka, proyeksi kebutuhan tenaga kerja per sektor) disajikan terpilah jenis kelamin	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menambahkan Prioritas Penerima Program Kegiatan Pekerja Sektor Informal Bukan Hanya Untuk Kepala Keluarga	Program Hubungan Industrial	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Membuka Akses Dan	Program Pelatihan Kerja	Kegiatan Pelaksanaan	Sub Kegiatan Proses	Dinas Penanaman Modal

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Mempromosikan Pelatihan Vokasi Bidang Teknis/Non-Tradisional Secara Aktif Kepada Peserta Perempuan. - Mendorong mitra swasta/industri menyediakan instruktur perempuan, minimal sebagai instruktur pendamping, khususnya pada bidang teknis.	Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mendorong mitra swasta/industri menyediakan instruktur perempuan, minimal sebagai instruktur pendamping, khususnya pada bidang teknis.			Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mendorong Perusahaan Mitra Menyediakan Skema Kerja Fleksibel (Paruh Waktu/Work From Anywhere) Yang Ramah Bagi Pencari Kerja Perempuan Dengan Peran	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Pengasuhan.				
Merevisi modul bimbingan jabatan agar netral gender dan berbasis minat serta kompetensi individu.		Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menetapkan kuota/afirmasi bagi perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan dalam program perluasan kesempatan kerja.			Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menyusun Basis Data Investor Dan Pelaku Usaha Terpilah Jenis Kelamin Sebagai Dasar Pemantauan	Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menyediakan Klinik/Helpdesk Pendampingan Perizinan (Oss/Nib) Khusus Bagi Pelaku Usaha Perempuan Dan Umkm.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tersedianya Layanan/Fasilitas Khusus Bagi Lansia, Toilet Ramah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Lansia, Ruang Ibu Menyusui Dan Ruang Ramah Anak/Taman Bermain.		Pemerintahan Daerah	Bangunan Lainnya	Satu Pintu
Mengintegrasikan data usaha mikro dan sektor unggulan berbasis perempuan (kerajinan, kuliner, industri rumahan) ke dalam peta potensi investasi.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu